

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Legitimasi

Menurut Rankin *et al.*, (2017), teori legitimasi digunakan untuk memahami aksi dan aktivitas perusahaan. Teori legitimasi didasari oleh interaksi antara bisnis dan masyarakat. Hal ini umumnya dikenal sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial menggambarkan ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap suatu bisnis pada lingkungan di mana bisnis beroperasi. Perusahaan perlu menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan harapan dalam kontrak sosial, yaitu dengan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan perlu melakukan strategi atau upaya untuk dapat memperoleh atau mempertahankan legitimasi.

Lindblom dalam Rankin *et al.*, (2017) mengidentifikasi terdapat empat cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk dapat memperoleh atau mempertahankan legitimasi, yaitu:

1. Berusaha untuk menginformasikan kepada masyarakat jika terdapat perubahan aktual dalam kinerja dan kegiatan perusahaan
2. Berusaha mengubah persepsi masyarakat, tetapi tidak mengubah perilaku
3. Berusaha untuk memanipulasi persepsi dengan mengalihkan perhatian dengan pengalihan
4. Berusaha untuk mengubah ekspektasi masyarakat terhadap kinerja perusahaan

Legitimasi dapat terjadi melalui kinerja perusahaan atau melalui pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Dalam upaya mempertahankan legitimasi, perusahaan harus mempertimbangkan hak-hak publik secara luas. Salah satu bentuk upaya yang perusahaan lakukan adalah dengan mengungkapkan kebijakan keberlanjutan bersama dengan informasi mengenai sistem manajemen lingkungan yang telah diterapkan, termasuk dengan mengungkapkan emisi karbon yang dihasilkan perusahaan (Rankin *et al.*, 2017).

Teori legitimasi umumnya digunakan untuk menjelaskan pengungkapan keberlanjutan perusahaan atau informasi terkait dengan aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan. Hal ini pula berkaitan dengan salah satu upaya perusahaan untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasinya. Pelaporan publik melalui *annual report* atau *sustainability report* perusahaan dapat menjadi media untuk menunjukkan bahwa perusahaan berusaha dalam memenuhi harapan masyarakat. Berkaitan dengan teori legitimasi, perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon untuk mendapatkan legitimasi agar perusahaan mempunyai tingkat keberlanjutan.

2.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Menurut Ghozali & Chariri (2007), teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, tetapi harus dapat memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*, seperti pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, masyarakat, serta pihak lainnya. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan bagaimana kegiatan operasinya mempengaruhi para

pemangku kepentingan dan tidak boleh hanya berkonsentrasi pada memaksimalkan keuntungan dan kepentingan pemilik (Rankin *et al.*, 2017). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan adalah dengan menyediakan informasi mengenai aktivitas dan kinerja perusahaan. Teori *stakeholder* umumnya digunakan untuk menguji pengungkapan informasi perusahaan secara *voluntary* kepada para pemangku kepentingan, yaitu berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan (Rankin *et al.*, 2017). Pemangku kepentingan mempunyai harapan terhadap perusahaan untuk dapat memperoleh kinerja keuangan yang baik, dengan adanya hal tersebut maka *stakeholder* mengharapkan perusahaan memberikan kontribusi positif berupa kegiatan sosial serta melakukan pengungkapan yang transparan pada laporan yang perusahaan terbitkan (Pratiwi, 2018).

2.3 Pengungkapan Emisi Karbon

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi (2019) emisi gas rumah kaca merupakan lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Gas rumah kaca merupakan gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

The Greenhouse Gas Protocol (2001) mengklasifikasikan GRK perusahaan ke dalam tiga *scope*, yaitu:

- *Scope 1: direct greenhouse gas (GHG) emissions*

Merupakan emisi GRK yang berasal langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan, seperti emisi dari kendaraan yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan, atau proses produksi bahan kimia yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan.

- *Scope 2: electricity indirect GHG emissions*

Merupakan emisi GRK yang berasal dari konsumsi listrik perusahaan.

- *Scope 3: other indirect GHG emissions*

Merupakan konsekuensi dari kegiatan perusahaan tetapi terjadi dari sumber yang tidak dimiliki atau dikendalikan perusahaan, seperti kegiatan ekstraksi dan produksi bahan yang dibeli, dan pengangkutan bahan bakar yang dibeli.

2.4 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Menurut Effendi (2018), *corporate governance* merupakan sebuah sistem yang dibangun guna mengarahkan pengelolaan perusahaan agar profesional dengan mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. *Corporate governance* akan menginisiasi terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Menurut Effendi (2018), terdapat lima prinsip *corporate governance* antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip transparansi

Pada prinsip ini perusahaan wajib menyampaikan informasi secara terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat dipertimbangkan yang berkaitan dengan keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, serta kepemilikan perusahaan.

2. Prinsip akuntabilitas

Prinsip ini mengatur bahwa dalam mengelola perusahaan, manajemen diharapkan dapat bertanggung jawab serta melakukan usaha yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan manajemen dan seluruh pemangku kepentingan secara seimbang.

3. Prinsip responsibilitas

Pada prinsip ini perusahaan harus memastikan bahwa dalam pengelolaannya telah mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

4. Prinsip independensi

Pada prinsip ini perusahaan diharuskan memiliki kemandirian agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan.

5. Prinsip kesetaraan

Pada prinsip ini perusahaan diharapkan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Sabrinna (2010), esensi dari tata kelola perusahaan ialah meningkatkan kinerja perusahaan melalui upaya pemantauan kinerja manajemen serta adanya akuntabilitas manajemen terhadap para pemangku kepentingan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penerapan tata kelola perusahaan juga memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Mengurangi biaya agensi (*agency cost*) yang merupakan biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat dari penyalahgunaan wewenang oleh pihak manajemen.

2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) yang merupakan dampak dari turunnya tingkat bunga dari dana dan sumber daya yang perusahaan gunakan seiring dengan menurunnya risiko perusahaan.
3. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan dan berbagai kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (2015) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada persero bertujuan untuk:

- a. Mendorong agar organ persero agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan didasari oleh nilai moral yang tinggi, patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sadar akan tanggung jawab sosial persero kepada para pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan di sekitar persero
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kesinambungan perusahaan sehingga memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pendirian persero, meningkatkan nilai pemegang saham, pegawai dan seluruh pemangku kepentingan
- c. Meningkatkan legitimasi persero yang dikelola secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Mengakui dan melindungi hak para pemegang saham dan pemangku kepentingan

- e. Meningkatkan kontribusi persero dalam perekonomian nasional
- f. Meningkatkan tata kelola terhadap persero dalam mewujudkan mandat yang diberikan pemerintah.

2.5 Dewan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan (2015) direksi didefinisikan sebagai organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik serta mewakili emiten atau perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pada suatu perusahaan publik, direksi harus terdiri paling sedikit 2 orang anggota direksi. Pengangkatan atau pemberhentian seorang anggota direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Direksi juga dapat membentuk komite yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Menurut Effendi (2018), dewan direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan, sedangkan dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan.

2.6 Keberagaman Gender

Keberagaman gender dalam dalam direksi perusahaan adalah salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan. Keberagaman gender pada direksi

perusahaan dilihat dari kehadiran perempuan sebagai anggota dari dewan direksi. Menurut Adams & Ferreira (2008), keberadaan perempuan dalam direksi memberikan dampak yang signifikan, yaitu berupa:

1. Direktur perempuan mempunyai peran besar dalam pengambilan keputusan, hal tersebut tercermin melalui tingkat partisipasi dan cara penugasan komite
2. Direktur perempuan cenderung mempunyai tingkat pengawasan yang lebih tinggi, hal tersebut dikarenakan perempuan mempunyai sensitivitas yang lebih besar
3. Direktur perempuan cenderung mengambil keputusan yang selaras dengan kepentingan pemegang saham

Menurut Cicchiello *et al.*, (2021), dewan perusahaan dengan tingkat keragaman gender yang lebih besar, cenderung memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan direktur perempuan berbeda dengan direktur laki-laki dalam hal kepribadian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman berkarir. Perempuan memiliki gaya berkomunikasi dan kepemimpinan yang berbeda dengan laki-laki, yaitu perempuan cenderung lebih sensitif, memiliki rasa empati yang tinggi, dan lebih bertanggung jawab secara sosial dibandingkan dengan laki-laki yang umumnya lebih berorientasi pada kinerja (Cicchiello *et al.*, 2021). Post *et al.*, (2011) menyatakan bahwa dewan direksi yang terdiri dari tiga atau lebih direktur perempuan lebih mungkin untuk menerapkan struktur atau proses tata kelola lingkungan.

Berdasarkan penelitian oleh Haque (2017) terdapat beberapa aspek yang membuat keberadaan perempuan dapat meningkatkan pengungkapan emisi karbon

perusahaan, pertama perempuan dianggap memiliki karakteristik komunal, yang membuat perempuan lebih sensitif terhadap kepentingan berbagai pemangku kepentingan yang selaras dengan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Kedua, anggota dewan direksi perempuan aktif dalam pengambilan keputusan serta diskusi yang terkait dengan *corporate social responsibility*. Ketiga, perusahaan dengan keragaman gender yang lebih besar cenderung mempunyai inovasi dalam menerapkan strategi sosial perusahaan, yaitu memiliki fokus tujuan jangka panjang dengan tidak hanya memperhatikan kinerja keuangan tetapi juga memperhatikan kinerja non keuangan seperti kinerja lingkungan.

2.7 Komite Lingkungan

Menurut Michelin & Parbonetti (2012), perusahaan sering kali menunjuk sebuah komite khusus untuk mengatasi masalah lingkungan melalui perspektif risiko, peluang strategis, serta komitmen kepada para pemangku kepentingan. Komite lingkungan memiliki tanggung jawab atas pengelolaan risiko lingkungan, yaitu mencakup risiko reputasi serta ancaman lingkungan terhadap legitimasi. Komite lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, mencatat, serta mengukur emisi GRK secara kredibel (Michelon & Parbonetti, 2012). Menetapkan komite lingkungan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan terutama dalam mengatasi risiko dan peluang berkelanjutan. Selain itu, kehadiran komite lingkungan juga menjadikan perusahaan lebih transparan dalam bidang sosial dan lingkungan (Jarboui *et al.*, 2022).

Komite lingkungan memiliki beberapa fungsi dalam perusahaan, seperti merumuskan dan merekomendasikan kepada dewan proyek atau kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan, merekomendasikan jumlah anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan CSR, melaksanakan inisiatif atau kegiatan CSR perusahaan, meninjau kinerja CSR perusahaan, serta membuat laporan atas proyek atau kegiatan CSR yang telah dilakukan kepada dewan (*India CSR Network, 2020*).

2.8 Sistem Manajemen Lingkungan

Sistem manajemen lingkungan didefinisikan sebagai kerangka kerja yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan lingkungannya melalui peninjauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja lingkungan secara konsisten (*United States Environmental Protection Agency, 2021*). Sistem manajemen lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengukur, mencatat, dan mengelola kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (*Rankin et al., 2017*). Penerapan sistem manajemen lingkungan dalam perusahaan menunjukkan komitmen perusahaan dalam memantau, mengelola, mengukur, serta melaporkan masalah lingkungan dengan lebih baik. Sistem manajemen lingkungan dapat membantu perusahaan dalam pengelolaan emisi karbon yang lebih baik. Menurut *Rankin et al., (2017)*, perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai emisi gas rumah kaca kemungkinan besar juga telah menerapkan sistem manajemen lingkungan dalam sistem tata kelola perusahaannya. Penerapan sistem manajemen lingkungan diatur dalam ISO 14001. ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional yang menetapkan persyaratan terkait dengan sistem manajemen

lingkungan. ISO 14001 membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah, mendapatkan keunggulan kompetitif, serta kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Menurut Giacomo *et al.*, (2017), untuk mendapatkan sertifikasi ISO 14001, perusahaan perlu mengidentifikasi dampak signifikan yang perusahaan timbulkan terhadap lingkungan, seperti emisi karbon, penggunaan energi, dan konsumsi air. Perusahaan akan memperoleh sertifikasi ISO 14001 jika sistem manajemen lingkungan perusahaan telah ditinjau oleh auditor eksternal dan telah sesuai dengan persyaratan standar ISO 14001. ISO 14001 berfungsi untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan dan produk yang dihasilkan perusahaan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan, khususnya dalam upaya pemenuhan kewajiban terhadap peraturan pada bidang lingkungan, mencegah pencemaran, serta berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan (ISO 14001, 2015). Tujuan dari ISO 14001 adalah untuk memungkinkan organisasi dari segala jenis atau ukuran untuk dapat mengembangkan serta menerapkan kebijakan yang bertanggung jawab pada lingkungan, seperti keberlanjutan sumber daya, pencegahan polusi, mitigasi perubahan iklim, dan meminimalisir dampak lingkungan (*Indonesia Environment & Energy Center*, 2017).

2.9 Penelitian Terdahulu

Saat ini telah banyak penelitian yang menganalisis pengaruh struktur tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Maka dari itu, peneliti

menyusun penelitian ini dengan mengacu pada penelitian terdahulu sebagai referensi utama.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Elsayih *et al.*, (2018) dengan judul “*Corporate Governance and Carbon Transparency: Australian Experience*”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Australia yang berpartisipasi dalam *Carbon Disclosure Project* (CDP) pada periode 2009-2012. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu sebanyak 203 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *carbon disclosure* yang diukur menggunakan CDP 2011 *scoring method*, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi dewan, keberagaman dewan, komite lingkungan, dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan *Ordinary Least Squares* (OLS) *regression model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan, keragaman dewan dan kepemilikan manajerial berkorelasi signifikan dengan tingkat transparansi karbon, sedangkan keberadaan komite lingkungan tidak.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Kılıç & Kuzey (2019) dengan judul “*The Effect of Corporate Governance on Carbon Emissions Disclosures*”. Populasi penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Istanbul tahun 2011-2015 dengan sampel sebanyak 154 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan emisi karbon yang diukur menggunakan *carbon disclosure index* (CDI) oleh CDP. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *board size*, *board composition*, dan *board*

diversity. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah direktur independen yang lebih mempengaruhi partisipasi perusahaan dalam Carbon Disclosure Project (CDP). Selain itu, keragaman kebangsaan dewan dan keberadaan komite keberlanjutan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon dan sejauh mana pengungkapan tersebut.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Pratiwi (2018) dengan judul “Implementasi *Carbon Emission Disclosure* di Indonesia”. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2016. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sebanyak 30 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan emisi karbon, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah regulator, kepemilikan institusi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan regulator dan kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan emisi karbon perusahaan, sedangkan ukuran dan profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Astiti & Wirama (2020) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu sebanyak

37 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah pengungkapan emisi karbon, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, tipe industri, dan *good corporate governance*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan tipe industri dan *good corporate governance* berpengaruh positif, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada pengungkapan emisi karbon. Ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan emisi karbon.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Liao *et al.*, (2015) dengan judul “*Gender Diversity, Board Independence, Environmental Committee and Greenhouse Gas Disclosure*”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 329 perusahaan di United Kingdom. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel keberagaman gender dengan kecenderungan untuk mengungkapkan informasi terkait gas rumah kaca yang perusahaan hasilkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran dewan direksi dan komite lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan gas rumah kaca.

Penelitian yang keenam dilakukan oleh Amaliyah & Solikhah (2019) dengan judul “Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Emisi Karbon”. Penelitian ini menggunakan sampel dari semua perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan *sustainability report* selama periode 2013-2017. Sampel dipilih menggunakan teknik sampling jenuh dengan *unbalanced sample* yaitu sebanyak

127 unit analisis. Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengungkapan emisi karbon, yang diukur menggunakan *content analysis* dari *The Global Reporting Initiative* (GRI). Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja lingkungan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, umur dewan direksi, dan tingkat pendidikan komisaris. Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional dan komite audit yang tinggi mampu meningkatkan pengungkapan emisi karbon perusahaan. Kinerja lingkungan, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, umur dewan direksi, dan tingkat pendidikan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian yang ketujuh dilakukan oleh Firmansyah *et al.*, (2021) dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia”. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sebanyak 65 perusahaan. Penelitian ini menggunakan pengungkapan emisi karbon sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan item dari GRI 305. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah tata kelola perusahaan dan ukuran perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan ukuran perusahaan berhubungan positif dengan pengungkapan emisi karbon perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat

meningkatkan transparansi informasi yang diberikan kepada publik secara sukarela, termasuk informasi emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan.

Tabel 2. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Elsayih <i>et al.</i> , (2018)	<i>Corporate Governance and Carbon Transparency: Australian Experience</i>	X1 = Independensi Dewan X2 = Keberagaman Dewan X3 = Komite Lingkungan X4 = Kepemilikan Manajerial Y = <i>Carbon Disclosure</i> Pengujian hipotesis dilakukan dengan <i>Ordinary Least Squares (OLS) regression model</i> .	Independensi Dewan, Keragaman Dewan dan Kepemilikan Manajerial berkorelasi signifikan dengan tingkat transparansi karbon, sedangkan Keberadaan Komite Lingkungan tidak.
2.	Kılıç & Kuzey (2019)	<i>The Effect of Corporate Governance on Carbon Emissions Disclosures</i>	X1 = <i>Board Size</i> X2 = <i>Board Composition</i> X3 = <i>Board Diversity</i> Y = Pengungkapan Emisi Karbon Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan	1. Jumlah direktur independen yang lebih mempengaruhi partisipasi perusahaan dalam Carbon Disclosure Project (CDP) 2. Keragaman kebangsaan dewan dan keberadaan komite keberlanjutan

			model regresi data panel.	memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon dan sejauh mana pengungkapan tersebut.
3.	Pratiwi (2018)	Implementasi <i>Carbon Emission Disclosure</i> di Indonesia	$X1 = \text{Regulator}$ $X2 = \text{Kepemilikan Institusi}$ $X3 = \text{Profitabilitas}$ $X4 = \text{Ukuran Perusahaan}$ $Y = \text{Pengungkapan Emisi Karbon}$ Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulator dan Kepemilikan Institusi mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon perusahaan. 2. Ukuran dan Profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon perusahaan.
4.	Astiti & Wirama (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	$X1 = \text{Ukuran Perusahaan}$ $X2 = \text{Profitabilitas}$ $X3 = \text{Leverage}$ $X4 = \text{Tipe Industri}$ $X5 = \text{Good Corporate Governance}$ $Y = \text{Pengungkapan Emisi Karbon}$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tipe Industri dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon perusahaan. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon perusahaan.

			Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda.	3. Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas tidak mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon perusahaan.
5.	Liao <i>et al.</i> , (2015)	<i>Gender Diversity, Board Independence, Environmental Committee and Greenhouse Gas Disclosure</i>	X1 = <i>Gender Diversity</i> X2 = <i>Board Independence</i> X3 = <i>Environmental Committee</i>	<i>Gender Diversity, Board Independence, dan Environmental Committee</i> berpengaruh positif terhadap <i>Greenhouse Gas Disclosure</i>
6.	Amaliyah & Solikhah (2019)	Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	X1 = Kinerja Lingkungan X2 = Kepemilikan Manajerial X3 = Kepemilikan Instiusional X4 = Komisaris Independen X5 = Ukuran Dewan Direksi X6 = Komite Audit X7 = Umur Dewan Direksi X8 = Tingkat Pendidikan Komisaris Y = Pengungkapan Emisi Karbon Pengujian hipotesis dilakukan dengan model	1. Kepemilikan Instiusional dan Komite Audit yang tinggi mampu meningkatkan Pengungkapan Emisi Karbon perusahaan. 2. Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Umur Dewan Direksi, dan Tingkat Pendidikan Komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

			regresi data panel.	
7.	Firmansyah <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia	X1 = Tata Kelola Perusahaan X2 = Ukuran Perusahaan Y = Pengungkapan Emisi Karbon Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda.	1. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Ukuran Perusahaan berhubungan positif dengan Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan. 2. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat meningkatkan transparansi informasi yang diberikan kepada publik secara sukarela, termasuk informasi emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Aktivitas operasi perusahaan menjadi salah satu penyumbang emisi karbon yang berpotensi menimbulkan pemanasan global. Hal ini menyebabkan timbulnya tuntutan dari masyarakat kepada perusahaan terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi dan mengonsumsi sumber daya. Maka dari itu, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasinya. Upaya

pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan dapat perusahaan nyatakan melalui pengungkapan emisi karbon.

Penerapan tata kelola perusahaan penting bagi keberlanjutan perusahaan. Sebagai badan manajemen puncak, dewan direksi bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan, mengawasi penggunaan aset perusahaan secara bijaksana, dan memastikan bahwa risiko lingkungan yang material dipantau dengan baik dan diungkapkan sepenuhnya (Kılıç & Kuzey, 2019). Anggota direksi yang lebih banyak akan meningkatkan kapasitas pemantauan serta menginisiasi kegiatan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan adalah melalui pengungkapan emisi karbon. Dewan direksi akan berusaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui pengungkapan emisi karbon sehingga tuntutan masyarakat dapat terpenuhi.

Adanya peningkatan pemantauan dari dewan direksi, membuat manajemen akan lebih memperhatikan dampak operasi yang perusahaan timbulkan terhadap lingkungan serta melakukan strategi proaktif dalam mengatasi dampak lingkungan, khususnya terkait dengan emisi karbon. Maka dari itu, perusahaan dengan ukuran dewan direksi yang lebih besar dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah emisi karbon dan melakukan pengungkapan emisi karbon (Kılıç & Kuzey, 2019). Hasil penelitian terdahulu oleh Liao *et al.*, (2015) menemukan hubungan positif antara ukuran dewan direksi dengan pengungkapan emisi karbon. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi pada perusahaan,

maka semakin luas pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A1} : Dewan Direksi Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.10.2 Pengaruh Keberagaman Gender terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Keberagaman gender dalam direksi perusahaan merupakan salah satu aspek penting dari tata kelola perusahaan. Keberagaman gender dalam direksi perusahaan dilihat dari kehadiran perempuan sebagai anggota dari dewan direksi. Menurut Hossain *et al.*, (2017), keberagaman gender dalam dewan dapat meningkatkan kualitas diskusi dan meningkatkan kemampuan dewan dalam memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap pengungkapan dan laporan perusahaan. Perempuan biasanya memiliki persepsi terhadap risiko yang lebih tinggi dan peka terhadap kebutuhan orang lain, hal ini menjadikan perempuan lebih memperhatikan tanggung jawab perusahaan (Ciocirlan & Pettersson, 2012). Wanita juga lebih cenderung memberikan tanggapan yang diinginkan secara sosial dan lebih sensitif terhadap masalah etika daripada pria (Bernardi, 2006). Untuk memahami efek yang dimiliki perempuan di dewan, penting untuk mempertimbangkan jumlah perempuan dalam dewan. Keragaman gender dewan dengan lebih dari dua direktur wanita mempengaruhi pengungkapan dewan tentang tingkat emisi GRK dan strategi perubahan iklim (Hossain *et al.*, 2017).

Perempuan akan memiliki kepedulian terhadap isu perubahan iklim dan juga mendorong strategi dan keputusan perusahaan yang berguna bagi kepentingan

bersama untuk mengurangi gas emisi karbon. Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan bagaimana kegiatan operasinya mempengaruhi para pemangku kepentingan dan tidak boleh hanya berkonsentrasi pada memaksimalkan keuntungan dan kepentingan pemilik (Rankin *et al.*, 2017). Liao *et al.*, (2015) menunjukkan bahwa semakin besar proporsi perempuan di dewan direksi memiliki kecenderungan untuk lebih transparan tentang pengungkapan lingkungan. Bahkan sejumlah kecil wanita dalam sampel yang dilakukan memiliki perbedaan dalam keputusan untuk pengungkapan gas rumah kaca. Hasil penelitian sebelumnya oleh Liao *et al.*, (2015) menemukan hubungan positif antara keragaman gender dan pengungkapan emisi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman gender berdampak pada pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A2} : Keberagaman Gender Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.10.3 Pengaruh Komite Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Aktivitas operasi perusahaan menjadi salah satu penyumbang emisi karbon yang berpotensi menimbulkan pemanasan global. Hal ini menyebabkan timbulnya tuntutan dari masyarakat kepada perusahaan terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi dan mengonsumsi sumber daya. Maka dari itu, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasinya. Upaya

pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan dapat perusahaan nyatakan melalui pengungkapan emisi karbon. Perusahaan sering kali menunjuk komite khusus untuk mengatasi masalah lingkungan melalui perspektif risiko, peluang strategis, serta komitmen kepada para pemangku kepentingan (Michelon & Parbonetti, 2012). Tujuan dari komite lingkungan adalah untuk secara sistematis merencanakan, melaksanakan dan meninjau kebijakan dan kegiatan keberlanjutan (Liao *et al.*, 2015). Keberadaan komite lingkungan pada suatu perusahaan dapat mendorong perusahaan dalam melakukan pengungkapan emisi karbon yang lebih luas. Rankin *et al.*, (2017) menyatakan bahwa keberadaan komite lingkungan sangat penting guna menjalankan pemantauan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan emisi karbon. Kehadiran komite lingkungan menjadikan perusahaan lebih transparan dalam melakukan pertanggungjawaban terkait dengan dampak lingkungan akibat aktivitas operasi perusahaan. Hasil penelitian terdahulu Kılıç & Kuzey (2019) menemukan adanya hubungan positif antara komite lingkungan terhadap praktik pengungkapan emisi karbon. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan komite lingkungan akan berdampak pada semakin luasnya pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A3} : Komite Lingkungan Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.10.4 Pengaruh Sistem Manajemen Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Sistem manajemen lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengelola kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Penerapan sistem manajemen lingkungan diatur dalam ISO 14001. ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. ISO 14001 membantu organisasi meningkatkan kinerja lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah, mendapatkan keunggulan kompetitif, serta dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Meski tidak diwajibkan, memiliki sertifikasi ISO 14001 merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan. Menurut Muktiono & Soediantono (2022), tujuan dari penerapan ISO 14001 sistem manajemen lingkungan sebagai standar internasional adalah sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran yang seimbang dengan kebutuhan sosial ekonomi.

Jika perusahaan menerapkan sistem manajemen lingkungan maka dapat menunjukkan komitmen perusahaan terkait dengan isu-isu lingkungan, seperti emisi karbon. Berkaitan dengan teori legitimasi, sistem manajemen lingkungan merupakan salah satu upaya yang digunakan perusahaan untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasinya di tengah masyarakat. Sertifikasi berstandar internasional Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 serta melakukan tanggung jawab sosial yaitu melalui pengungkapan emisi karbon berkonsep pada *triple bottom line* dimana tujuan dari mendirikan usaha tidak semata-mata untuk

mencari keuntungan (*profit*), namun juga ikut dalam mensejahterakan masyarakat (*people*), untuk menjamin kelangsungan hidup (*planet*) (ISO 14001, 2015).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Dewi & Kurniawan (2020) menemukan bahwa sistem manajemen lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Sistem manajemen lingkungan memberikan dorongan kepada perusahaan untuk terus melakukan upaya-upaya yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Menurut Rankin *et al.*, (2017), perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai emisi gas rumah kaca kemungkinan besar juga telah menerapkan sistem manajemen lingkungan dalam sistem tata kelola perusahaannya. Hal tersebut menunjukkan korelasi yang positif antara penerapan sistem manajemen lingkungan dengan pengungkapan emisi karbon perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A4} : Sistem Manajemen Lingkungan Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon